



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022**



DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dponegoro No. 139 Telp. (031) 8071604 Fax. (031) 8073915
Situs : diskominfo.sidoarjokab.go.id, Email : diskominfo.sidoarjokab@gmail.com

S I D O A R J O - 6 1 2 1 3

BERITA ACARA

HASIL PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Nomor : 027/05/438.5.14/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/05/438.5.14/2023 tanggal 27 Juni 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Tetap
Indikator : Nilai Indeks SPBE	Indikator : Nilai Indeks SPBE	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	Tetap
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Tetap
Indikator : Persentase PD yang memiliki keterisian SPBE	Indikator : Persentase Capaian Aspek SPBE	Berubah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Tetap
Indikator : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Indikator : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Tetap
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Tambahan Sasaran
	Indikator Kinerja : a. Nilai SAKIP b. Nilai RB c. Nilai SKM d. Nilai IPP	Tambahan Indikator Sasaran

1. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
1. Nilai Indeks SPBE	Hasil Penilaian SPBE Kabupaten Sidoarjo	Rata-rata Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo
2. Persentase Capaian Aspek SPBE	Nilai akhir x 8 aspek penilaian -----x 100%	Nilai akhir dikali 8 aspek penilaian dibagi 3 kali 8 aspek penilaian dikali 100%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
	3 x 8 aspek penilaian	
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik Diskominfo
4. Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo pada komponen perencanaan
5. Nilai RB	Hasil penilaian reformasi birokrasi Diskominfo	Nilai RB Diskominfo dalam mencapai good governance
6. Nilai IPP	Hasil Indeks Pelayanan Publik Diskominfo	Nilai IPP Diskominfo dalam memberikan pelayanan prima kepada publik
7. Nilai SKM	Hasil survey terhadap kepuasan Diskominfo	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo

2. Target Kinerja

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase PD yang memiliki keterisian SPBE	%	20%	35%	50%	50%	55%	60%	60%
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Nilai	83	85	87	89	91	93	93

b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan target sasaran Renstra PD)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase Capaian Aspek SPBE	%	20%	35%	108%	108%	108%	108%	108%
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Nilai	83	85	87	89	91	93	93

Nama Program	Indikator	SATUAN	Kondisi awal renstra (21)	Target kinerja pada tahun					Akhir renstra (26)
				2022	2023	2024	2025	2026	
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Informasi)								

d. Rincian Target Indikator Kinerja Program Setelah Perubahan

Tidak ada perubahan target kinerja Program

e. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses	Tingkat	Rintisan	Terkelola	Terdefinisi	Terpadu dan Terukur	Optimum	Optimum	Optimum
	2. Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan	Tingkat	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi	Optimum	Optimum	Optimum	Optimum
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah yang ditetapkan	Unit	150	160	170	180	190	200	200
	4. Jumlah up-time dalam 1 tahun	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5. Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Buah	2	2	2	2	2	2	2
	6. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Aduan	3	3	3	3	3	3	3
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7. Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa	Data	3	3	3	4	5	5	5
Penyelenggaraan	8. Jumlah area kontrol	Lokasi	6	7	7	8	8	9	9

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013								
	9. Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Buah	7	7	7	8	8	8	8
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10. Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	11. Jumlah dokumen monev PD yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
	12. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
	13. Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14. Jumlah gaji dan tunjangan asn terbayar	Orang	62	62	70	70	75	80	80
	15. Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16. Jumlah BMD dalam kondisi baik	Unit	15	15	15	15	15	15	15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi dan perundang-undangan	Orang	10	10	10	10	10	10	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18. Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Buku	5	5	5	5	5	5	5
	19. Jumlah	Buah	5	5	5	5	5	5	5

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bahan/ material yang tersedia								
	20. Jumlah BMD yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
	21. Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Laporan	50	50	50	50	50	50	50
	22. Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	Kotak	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	23. Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	Buah	20	20	30	30	30	30	30
	24. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kunjungan	30	30	30	35	40	45	45
	25. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	2	2	2	2	2	2	2
	26. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	2	2	3	3	3	3	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Jumlah luas Gedung/ kantor/ rumah dinas jabatan yang dipelihara	m ²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	28. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tersedia	Unit	15	15	15	15	15	15	15
	29. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit	15	15	15	15	15	15	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30. Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31. Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	Orang	35	35	35	35	35	35	35
	32. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Buah	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	33. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	2	2	2	2	2	2	2

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	34. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	2	2	2	2	2	2	2
	35. Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12

f. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase indikator tingkat kematangan layanan yang mencapai nilai >4	%	N/A	N/A	50%	60%	70%	80%	80%
	2. Persentase indikator tingkat kematangan kebijakan, tata Kelola, dan manajemen yang mencapai nilai >4	%	N/A	N/A	50%	60%	70%	80%	80%
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah yang ditetapkan	Unit	150	160	170	180	190	200	200
	4. Jumlah up-time dalam 1 tahun	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5. Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Buah	2	2	2	2	2	2	2
	6. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Aduan	3	3	3	3	3	3	3
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7. Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa	Data	3	3	3	4	5	5	5
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	8. Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi	Lokasi	6	7	7	8	8	9	9

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIRE
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	berdasar ISO 27001:2013								
	9. Jumlah penyelenggara an persandian untuk pengamanan informasi	Buah	7	7	7	8	8	8	8
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10. Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	11. Jumlah dokumen monev PD yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
	12. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
	13. Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14. Jumlah gaji dan tunjangan asn terbayar	Orang	62	62	70	70	75	80	80
	15. Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16. Jumlah BMD dalam kondisi baik	Unit	15	15	15	15	15	15	15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi dan perundang-undangan	Orang	10	10	10	10	10	10	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18. Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Buku	5	5	5	5	5	5	5
	19. Jumlah bahan/material yang tersedia	Buah	5	5	5	5	5	5	5
	20. Jumlah BMD yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
	21. Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Laporan	50	50	50	50	50	50	50
	22. Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	Kotak	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	23. Jumlah	Buah	20	20	30	30	30	30	30

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (1)	SATUAN (2)	KONDISI AWAL (3)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIRE (9)
				2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2025 (7)	2026 (8)	
	komponen listrik/ penerangan yang tersedia								
	24. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kunjungan	30	30	30	35	40	45	45
	25. Jumlah penyediaan peralatan dan perengkapan kantor	Buah	2	2	2	2	2	2	2
	26. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	2	2	3	3	3	3	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Jumlah luas Gedung/ kantor/ rumah dinas jabatan yang dipelihara	Luas (m ²)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	28. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tersedia	Unit	15	15	15	15	15	15	15
	29. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit	15	15	15	15	15	15	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30. Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31. Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	Orang	35	35	35	35	35	35	35
	32. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Buah	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	33. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	2	2	2	2	2	2	2
	34. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	2	2	2	2	2	2	2
	35. Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar		12	12	12	12	12	12	12

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026;
2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. HERY SOESANTO, SH., MH
NIP. 196805191988031002

Dr. HERY SOESANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 198803 1 002

Sidoarjo, 27 Juni 2023
**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. DIDIK TRIWAHYUDI, M. Si
NIP. 196508251992101003

Drs. DIDIK TRIWAHYUDI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19652825 199210 1 003



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 27 Juni 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. Didik Triwahyudi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196508251992101003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO	II-1
2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II-4
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat.....	II-4
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	II-6
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Kelola Informatika	II-9
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	II-11
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik	II-14
2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	II-15
2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional	II-16
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	II-32



2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	I-36
2.4.1	Telaahan Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	II-37

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH.....	III-1	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-5
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur	III-13
3.3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	III-13
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	III-15
3.4	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
-----	--	------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	I-17
Tabel 2.2 Sebaran PNS Berdasarkan Eselon	II-18
Tabel 2.3 Sebaran PNS Berdasarkan Umur.....	II-19
Tabel 2.4 Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan	II-20
Tabel 2.5 Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	II-22
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Periode 2019-2021.....	II-32
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2021.....	II-34
Tabel 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L*	II-37
Tabel 2.9 Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.	II-38
Tabel 3.1 Masalah pokok, Masalah dan Akar Masalah Diskominfo	III-1
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	III-3
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	III-11
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	III-14
Tabel 3.5 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	III-16
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III-19
Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria.....	III-19
Tabel 3.8 Rata-Rata Skor Isu Strategis	III-20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	IV-3
Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal.....	V-2



Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Kebijakan	V-5
Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah (PD)	V-7
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022	VI-7
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026	VI-15
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2
Tabel 7.2 Formulasi Perhitungan IKU Diskominfo	VII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota.....	I-4
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017	II-3
Gambar 2.2 Presentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	II-17
Gambar 2.3 Sebaran PNS Berdasarkan Eselon.....	II-18
Gambar 2.4 Sebaran PNS Berdasarkan Umur	II-20
Gambar 2.5 Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan	II-21
Gambar 4.1 Cascading Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo	IV-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENGERTIAN RENSTRA

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 3 menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyiapkan rancangan renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan otonomi yang seluas luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Diskominfo tahun 2021-2026. Dimana, dalam penyusunannya, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Permendagri 86 Tahun 2016, Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 27. Peraturan Bupati



Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2021, disahkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dalam Kepmendagri ini diatur tentang nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya untuk seluruh urusan pemerintah daerah. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

Implikasi disahkannya kebijakan tersebut adalah berubahnya Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo terutama pada matriks Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan Rancangan Akhir perubahan atas Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

1.1.2 FUNGSI RENSTRA OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.



1.1.3 PROSES PENYUSUNAN RENSTRA OPD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah terdapat pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi "(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional".

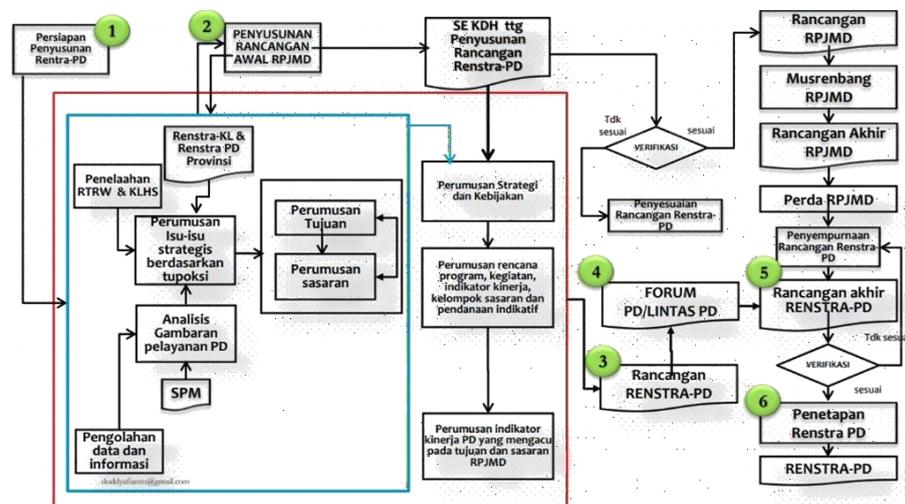
Sedangkan Pasal 273 berbunyi "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. (3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan."

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan acuan dalam proses menyusun Renstra pada Pasal 15, yang berbunyi "(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Rencana Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat gambar 1.1:



Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Bagan diatas adalah menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Pada Dokumen PD adalah penjabaran dari RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan PD dalam mendukung prioritas dari Bupati. Sementara itu penetapan kebijakan baru terkait dengan adanya dinamika pembangunan yang belum terakomodasi dalam RPJMD dapat dimulai dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, diperlukan telaah Dokumen perencanaan lainnya Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, untuk mensinergikan rencana strategis PD dengan pusat dan provinsi.



Pada proses penyusunan Renstra PD dapat dilihat pada gambar bagian alur tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Seiring dengan adanya tuntutan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien kepada pihak masyarakat, swasta, maupun stakeholder lainnya, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk lebih mengutamakan dan menjalankan fungsinya sebagai regulator, fasilitator, mediator, koordinator, maupun pengawasan sehingga dalam pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga dan sesuai dengan sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);



13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;



26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
35. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran tentang strategis arah program kerja, rencana kerja, dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rancangan Akhir perubahan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas KOMunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

**BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Bidang Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dipimpin oleh seorang Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab dengan Kepala Dinas.

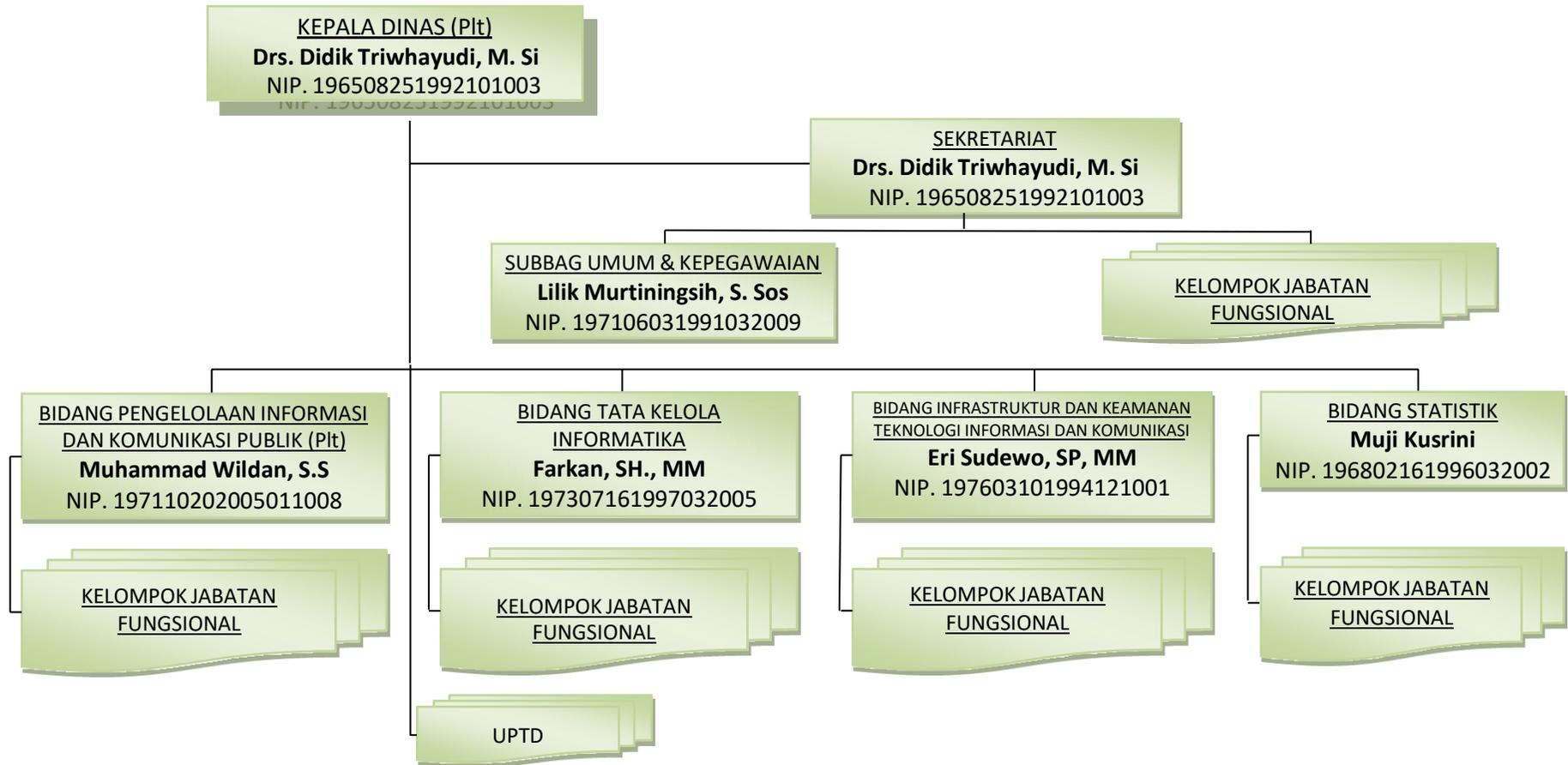
Untuk Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di atas sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Pasal 4 berbunyi "Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.". Sedangkan pada Pasal 5 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Maka dapat disimpulkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi dan tugas pokok mulai dari perumusan kebijakan,



pelaksanaan kebijakan, hingga melaksanakan tugas yang selanjutnya sebagai tinjauan evaluasi dalam hal komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidoarjo. Agar dapat terlaksananya fungsi dan tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut maka tersusunlah struktur organisasi dan tata kerja yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo terdapat sebuah perubahan menurut Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat diketahui bahwa, terdapat tiga level dalam penyusunan struktur organisasi yang terdiri dari Pertama, Kepala Dinas; Kedua, Sekretaris; Ketiga, Kepala Bidang; dan Keempat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai 6 fungsi, yakni:

1. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
3. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai 8 fungsi, yakni:

1. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas;
5. Pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 - c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 - d. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan;



6. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi :
 - a. Penyusunan program kerja dinas;
 - b. Pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;
 - e. Penyusunan laporan kinerja dinas;
 - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
7. Pelaporan kinerja dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dinas;
3. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
6. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
8. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.



2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 8 fungsi, yakni:

1. Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi :
 - a. Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten;
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten;
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengelolaan Informasi dan Opini Publik meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan opini publik;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik, meliputi:
 - a) melaksanakan kebijakan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di Kabupaten;
 - b) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di Kabupaten;
 - c) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di Kabupaten;
 - d) mengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pemenuhan informasi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah);



- e) melaksanakan pengelolaan dokumentasi hasil-hasil peliputan dan penyiaran dalam bentuk e-kliping;
- f) melaksanakan klarifikasi informasi pemberitaan dan opini publik kepada pers/ media massa;
- g) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan informasi dan opini publik;
- c. Menyusun dan memperbaharui data Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- 4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik, meliputi:
 - a) melaksanakan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
 - b) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
 - c) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
 - d) melaksanakan fungsi kehumasan terdiri dari peliputan, pembuatan press release terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah maupun masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi menggunakan



- sarana audio video maupun visual dan mendokumentasikannya dalam bentuk multimedia;
- e) memfasilitasi kegiatan ceramah dan dialog rutin maupun insidental tatap muka melalui workshop/lokakarya, anjungsana, sarasehan, diskusi dan dialog interaktif;
 - f) melakukan kerjasama kemitraan dengan media massa (cetak, elektronik, multimedia, dan digital);
 - g) melakukan pendataan dan fasilitasi pembinaan secara rutin serta berkelanjutan pada wartawan media massa yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo;
 - h) menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM di bidang jurnalistik;
- c. menyusun dan memperbaharui data media dan kemitraan komunikasi publik;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik;
5. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Layanan Informasi Publik meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informasi publik, meliputi:
 - a) melaksanakan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten;
 - b) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten;
 - c) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten;
 - d) melaksanakan penyebaran informasi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat melalui Portal, website, media sosial dan digital pemerintah kabupaten sidoarjo;
 - e) melaksanakan dan menyiapkan pembuatan media informasi yang memuat agenda dan kebijakan pimpinan daerah serta OPD, pembangunan, sosialisasi regulasi dan lain-lain berupa cetak, elektronik, multimedia dan digital;



- f) melakukan pembentukan, pendampingan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - g) menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi publik lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
 - h) melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui lapor.go.id, p3m.sidoarjokab.go.id, media sosial;
 - i) menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur (SDM) dalam pelayanan informasi;
- c. menyusun dan memperbaharui data layanan informasi publik;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - 7. Melaporkan kinerja Bidang;
 - 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG TATA KELOLA INFORMATIKA

Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov). Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai 8 fungsi, yakni:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis Tata Kelola Informatika;
- 2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Tata Kelola Informatika meliputi :
 - a. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi umum, khusus dan suplemen yang terintegrasi;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
 - c. pelaksanaan layanan informatika meliputi website, email dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi tugas–tugas GCIO (Government Chief Information Officer) di pemerintah daerah;



- e. pengkoordinasian kebijakan teknis tata kelola e-gov (SPBE/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Aplikasi Informatika meliputi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
 - b) menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Aplikasi Informatika, meliputi:
 - 1) melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi dari OPD;
 - 2) melaksanakan fasilitasi integrasi antar aplikasi baik dari aplikasi sudah ada maupun yang akan dibangun;
 - 3) norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi di Kabupaten;
 - 4) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika yang terintegrasi di Kabupaten;
 - c) menyusun dan memperbaharui data aplikasi informatika;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis aplikasi informatika;
4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Layanan Informatika meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informatika;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informatika, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;



- b) menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan website, email, dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - c) melaksanakan kebijakan terkait fungsi layanan informatika meliputi website, email dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informatika;
5. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov):
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) :
 - a) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE;
 - b) Smart City;
 - b. menyusun dokumen Roadmap TIK kabupaten;
 - c. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan SPBE dan smart city di kabupaten;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Government Chief Information Officer (GCIO);
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan teknis Tata Kelola E-Government;
 - f. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola informatika;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.5 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai 8 fungsi, yakni:



1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten;
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi :
 - a. pengkoordinasian sinkronisasi, fasilitasi dan pengembangan bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan TIK;
 - b. peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan TIK;
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) merencanakan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan internet, Network Operation Center (NOC), Infrastruktur Server dan Penunjangnya, DRC, command centre, dan peningkatan infrastruktur TIK;
 - b) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - c) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan infrastruktur TIK yang memanfaatkan jaringan intra pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah
4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain meliputi :



- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain, meliputi:
 - a) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
 - b) melakukan perencanaan dan Pelaksanaan Layanan Domain meliputi domain, sub domain, Layanan Web Server dan panel kontrol hos web;
 - c) melaksanakan layanan hosting dan colocation server perangkat daerah;
 - d) melakukan pengelolaan domain, sub domain, layanan web server, dan panel kontrol hos web;
 - e) melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
 - f) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informatika;
5. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian :
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian, meliputi:
 - a) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian di Kabupaten;
 - b) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keamanan informasi dan persandian;
 - c) Melaksanakan literasi kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
 - d) melaksanakan operasional persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman, pengelolaan



- sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi;
- e) melaksanakan audit keamanan informasi;
- f) melaksanakan penilaian dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
- g) melakukan pemantauan dan evaluasi terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian di Kabupaten;
- h) melaksanakan peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
- i) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan keamanan informasi;
- c. menyiapkan tugas ketatausahaan bidang;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.6 BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai 8 fungsi, yakni:

1. Penyusunan kebijakan teknis statistik;
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik;
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang statistik;
4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengolahan Data Statistik meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Statistik;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengolahan Data Statistik, meliputi:
 - a) melaksanakan kebijakan terkait fungsi Pengolahan Data Statistik di Kabupaten;
 - b) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi Pengolahan Data Statistik kabupaten;



- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisa data statistic di kabupaten;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data statistik;
5. Pelaksanaan kegiatan/ sub Layanan Statistik dan Pelaporan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Layanan Statistik dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan Layanan Statistik dan Pelaporan, meliputi:
 - a) melaksanakan kebijakan terkait fungsi Layanan Statistik dan Pelaporan di Kabupaten;
 - b) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi Layanan menyusun dan memperbaharui data media dan kemitraan komunikasi publik;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan layanan statistik;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur sumber daya manusia di bidang statistik;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyebaran data statistik melalui media cetak dan digital;
 - f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan layanan statistik dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis statistik;
7. Pelaporan kinerja Bidang;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.



2.1.8 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya. Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti pada Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Pelayanan serta Unit Usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki kekuatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 33 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 27 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

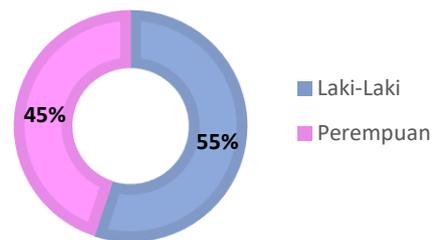


Tabel 2.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Eselon	Jumlah	%
1	Laki-Laki	33	55
2	Perempuan	27	45
	J U M L A H	60	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi persentase jumlah PNS berjenis laki-laki sebanyak 55% sedangkan proporsi persentase jumlah PNS berjenis perempuan sebanyak 45%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.2

Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Data sebaran PNS berdasarkan eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon II/a sejumlah 1 orang, jumlah pegawai eselon III/a sejumlah 5 orang, jumlah pegawai eselon IV /a sejumlah 11 orang, jumlah staf sejumlah 44 orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

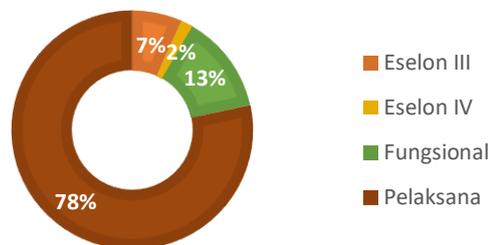


Tabel 2.2
Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	%
1	Eselon III	4	7%
2	Eselon IV	1	2%
3	Fungsional Es IV	8	13%
4	Pelaksana/Staf	47	78%
	J U M L A H	60	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan gambar 2.2 diketahui bahwa PNS berdasarkan eselon terbanyak pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah staf dengan persentase sebesar 78%, sedangkan jumlah eselon terendah pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada eselon IV dengan persentase sebesar 2%. Selain itu persentase pegawai eselon III sebesar 7% dan fungsional eselon IV sebesar 13%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.3

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Data sebaran PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berdasarkan umur didominasi oleh golongan umur 41-50 tahun dengan jumlah sebanyak 18 pegawai. Sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 21-30 tahun sebanyak 14 pegawai, ketiga golongan umur 31-40 tahun sebanyak 12 pegawai, golongan 51-55 tahun sebanyak 12 pegawai, dan golongan umur >56



tahun sebanyak 4 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh pegawai yang cukup berpengalaman, maka akan memungkinkan sangat berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

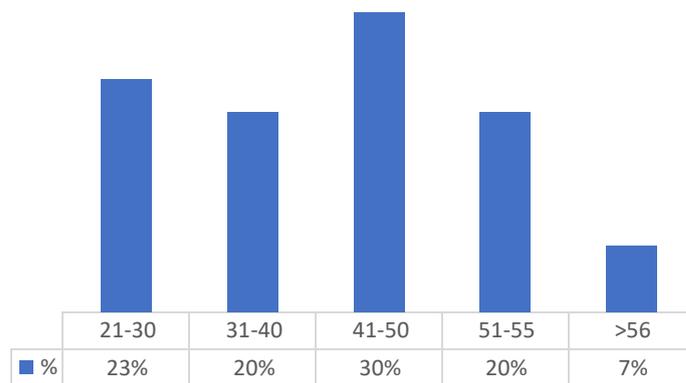
Tabel 2.3

Sebaran PNS Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	21 - 30 th	14	23
2	31 - 40 th	12	20
3	41 - 50 th	18	30
4	51 - 55 th	12	20
5	> 56 th	4	7
	J U M L A H	60	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan gambar 2.3. berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 30%; persentase golongan umur 21-30 tahun sebesar 23%; persentase golongan umur 31-40 tahun sebesar 20%, persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 20%; dan persentase golongan umur <56 tahun sebesar 7%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:



Gambar 2.4

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Umur

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Jika melihat tabel diatas bahwa sebaran berdasarkan komposisi pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah pegawai yang paling tinggi adalah pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 29 orang; Diploma III (DIII) sebanyak 14 orang, pegawai yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 12 orang; serta pegawai yang berpendidikan Magister (S2) menempati urutan ketiga sebanyak 6 orang. Data dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

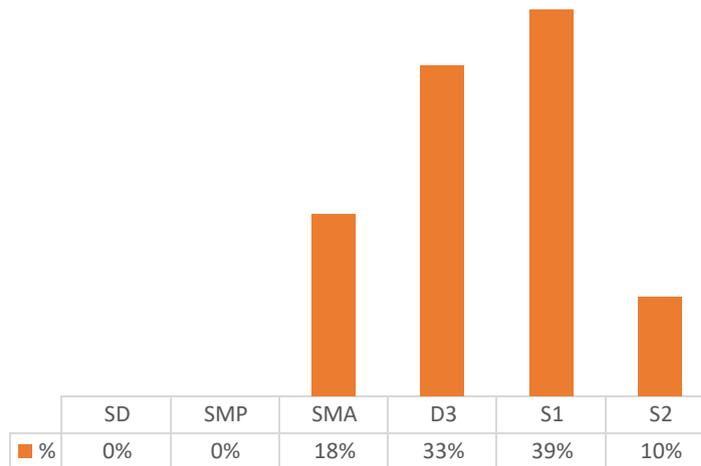
No	Pendidikan PNS	Jumlah	%
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMA	11 orang	18
4	D3	20 orang	33
5	S1	23 orang	39
6	S2	6 orang	10
	Jumlah	60 orang	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan pada gambar 2.4. berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan pendidikan sebagai berikut persentase pendidikan pegawai SD dan SLTP sebanyak 0



orang; persentase pendidikan pegawai SLTA sebanyak 35%; persentase pendidikan pegawai DIII sebanyak 12%; persentase pendidikan pegawai S1 sebanyak 46%; persentase pendidikan pegawai S2 sebanyak 8%. Data dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:



Gambar 2.5

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dengan sebagian besar SDM memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 39%. Akan tetapi masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT, khususnya programmer. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan transfer source code jika terjadi pergantian programmer untuk aplikasi pengaduan.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo diantaranya dalam peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung atau kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan atau pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas atau kegiatan. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas baru, maka sarana dan prasarana yang ada masih dalam proses pelimpahan aset. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT :			
	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit	Baik	
	Lemari Besi/Metal	1 Unit	Baik	
	Lemari Kayu	2 Unit	Baik	
	Filing Cabinet Besi	3 Unit	Baik	
	Brankas	2 Unit	Baik	
	Roll Opek	1 Unit	Baik	
	CCTV – Camera Control Television System	8 Unit	Baik	
	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Kayu	6 Unit	Baik	
	Meja Panjang	1 Unit	Baik	
	Kursi Lipat	12 Unit	Baik	
	Sofa	1 Unit	Baik	Ruang Kepala Dinas
	A.C. Window	2 Unit	Baik	
	A.C. Split	2 Unit	Baik	
	A.C. Split	3 Unit	Baik	R. Balai Wartawan
	A.C. Split	1 Unit	Baik	Front Office
	A.C. Split	1 Unit	Baik	Media Center
	Televisi	1 Unit	Baik	
	Televisi	1 Unit	Baik	R. Balai Wartawan



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Televisi	1 Unit	Baik	R. Kadin
	Tangga Alumunium	1 Unit	Baik	
	Dispenser	1 Unit	Baik	
	Coffee Maker	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit	Baik	
	Audio Maximizer	1 Unit	Baik	
	Slide Projector	1 Unit	Baik	
	Kamera Stile	1 Unit	Baik	
	Telephone Mobile	1 Unit	Baik	
	Telephone Mobile	1 Unit	Baik	TIK
	Facsimile	1 Unit	Baik	
	P.C. Unit	10 Unit	Baik	
	Laptop	4 Unit	Baik	
	Note Book	5 Unit	Baik	
	Printer	11 Unit	Baik	
	Scanner	2 Unit	Baik	
	Lainnya (Hepa filter)	1 Unit	Baik	
2	BIDANG TATA KELOLA INFORMATIKA :			
	Lemari Kayu	2 Unit	Baik	
	Rak Kayu	1 Unit	Baik	
	Buffet	1 Unit	Baik	
	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Baik	
	LCD Projector/Infocus	2 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	A.C. Window	3 Unit	Baik	
	A.C. Split	2 Unit	Baik	
	A.C. Split	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Televisi	3 Unit	Baik	
	Unit Power Supply	3 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Dispenser	1 Unit	Baik	



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dispenser	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Bracket Standing Peralatan	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13 Unit	Baik	Sekretariat
	Modulation Monitor Speaker Kabaret	2 Unit	Baik	
	Microphone/Wireless MIC	8 Unit	Baik	
	Microphone/Boom Stand	2 Unit	Baik	
	Video Mixer	1 Unit	Baik	
	Tripod Camera	4 Unit	Baik	
	Mixer PVC	1 Unit	Baik	
	Head Set	1 Unit	Baik	
	Audio Converter	2 Unit	Baik	
	Camera Conference	5 Unit	Baik	
	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 Unit	Baik	
	P.C Unit	8 Unit	Baik	
	P.C Unit	1 Unit	Baik	Mutasi Setda
	P.C Unit	10 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Laptop	3 Unit	Baik	
	Note Book	2 Unit	Baik	
	Note Book	4 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Tablet PC	2 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	2 Unit	Baik	
	Monitor	2 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit	Baik	Sekretariat



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik	
	External/ Portable Hardisk	7 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Router	2 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Hub	1 Unit	Baik	
	Wireless Access Point	1 Unit	Baik	Bid. Pengelolaan Informasi
	Switch	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Lenovo Think System Qlogic)	1 Unit	Baik	
3	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI :			
	Televisi	16 Unit	Baik	MPP
	Televisi	2 Unit	Baik	Studio
	Sound System	1 Unit	Baik	
	Tangga Hidrolik	1 Unit	Baik	
	Bracket Standing Peralatan	11 Unit	Baik	
	Profesional Sound System	1 Unit	Baik	MPP
	Camera View Finder	2 Unit	Baik	
	P.C. Unit	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Router	1 Unit	Baik	Paseban
	Router	1 Unit	Baik	Pus. Sidoarjo
	Router	1 Unit	Baik	Tanggulangin
	Router	1 Unit	Baik	Balongsendo
	Router	1 Unit	Baik	Tarik
	Router	1 Unit	Baik	Prambon
	Router	1 Unit	Baik	Sukodono
	Router	1 Unit	Baik	Krian
	Router	1 Unit	Baik	Sedati
	Router	1 Unit	Baik	Waru
	Repeater and Transciever	1 Unit	Baik	Prambon
	Repeater and Transciever	1 Unit	Baik	Sukodono



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Repeater and Transciever	1 Unit	Baik	Sedati
	Repeater and Transciever	1 Unit	Baik	Waru
	Repeater and Transciever	1 Unit	Baik	MPP Sukodono
	Cat 6 Cable	7 Unit	Baik	Alun-alun
	Kabel UTP	2 Unit	Baik	Alun-alun
	Kabel UTP	1 Unit	Baik	GOR
	Switch	3 Unit	Baik	Inspektorat
	Switch	1 Unit	Baik	Sidoarjo
	Switch	1 Unit	Baik	Bag. AP Setda
	Switch	1 Unit	Baik	Pendopo
	Switch	1 Unit	Baik	Bappeda
	Switch	3 Unit	Baik	BKD
	Switch	2 Unit	Baik	MPP Sukodono
	Switch	1 Unit	Baik	Satpol PP
	Lainnya (YSP Online UPS LT 80)	1 Unit	Baik	Data Center
	Lainnya (HIKVISION)	1 Unit	Baik	Alun-alun
	Lainnya (HIKVISION)	2 Unit	Baik	BKD
	Lainnya (HIKVISION)	2 Unit	Baik	Sekretariat Daerah
	Lainnya (HIKVISION)	2 Unit	Baik	GOR
4	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	Lemari Besi/Metal	1 Unit	Baik	
	Brandkas	1 Unit	Baik	
	Compact Rolling	1 Unit	Baik	
	Lemari Katalog	1 Unit	Baik	
	Lemari Sorok	1 Unit	Baik	
	CCTV - Camera Control Television System	1 Unit	Baik	
	LCD Projector/Infocus	3 Unit	Baik	
	Lainnya (FW 50 Dummy Battery DC Coupler)	2 Unit	Baik	
	Meja Kerja Kayu	1 Unit	Baik	
	Sofa	1 Unit	Baik	
	A.C. Window	2 Unit	Baik	
	A.C. Split	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Televisi	5 Unit	Baik	
	Unit Power Supply	3 Unit	Baik	
	Tangga Aluminium	2 Unit	Baik	



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dispenser	1 Unit	Baik	
	Tangga Hidrolik	1 Unit	Baik	
	Handy Cam	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Cabinet Penyimpan camera)	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik	
	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	2 Unit	Baik	Mutasi dari Setda
	Audio Visual	3 Unit	Baik	
	Set Studio Light Signal	1 Unit	Baik	
	Microphone/Wireless MIC	4 Unit	Baik	
	Professional Sound System	1 Unit	Baik	
	Camera Electronic	8 Unit	Baik	
	Camera Electronic	3 Unit	Baik	Mutasi dari Setda
	Pulse Distribution Amplifier	3 Unit	Baik	
	Video Switcher	1 Unit	Baik	
	Remote Control Unit	2 Unit	Baik	
	Tripod Camera	6 Unit	Baik	
	Camera Film	3 Unit	Baik	
	Lensa Kamera	3 Unit	Baik	
	Camera View Finder	2 Unit	Baik	
	Camera Digital	6 Unit	Baik	
	Kamera Stile	1 Unit	Baik	
	Monopod	1 Unit	Baik	
	Camera Conference	2 Unit	Baik	
	Lainnya (Mavic Air Intelligent Fligh Baterai)	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Paket pengadaan ruang mini studio)	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Hepa filter (pembersih udara))	1 Unit	Baik	
	P.C Unit	29 Unit	Baik	
	P.C Unit	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Laptop	3 Unit	Baik	



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Note Book	4 Unit	Baik	
	Tablet PC	2 Unit	Baik	
	Hard Disk	3 Unit	Baik	
	Monitor	1 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	Baik	
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	10 Unit	Baik	
	External CD/ DVD Drive (ROM)	2 Unit	Baik	
	External/ Portable Hardisk	10 Unit	Baik	
	Router	2 Unit	Baik	
	Wireless Access Point	1 Unit	Baik	
	Switch	1 Unit	Baik	
	Lainnya (PanoVu Mini Series IR Network PIZ Camera)	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Konektor RJ45 Cat 6)	1 Unit	Baik	
5	BIDANG STATISTIK		Baik	
	Brandkas	1 Unit	Baik	
	Lemari Katalog	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	Baik	Sekretariat
	P.C Unit	4 Unit	Baik	
	Laptop	1 Unit	Baik	
	Note Book	2 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik	
	External/ Portable Hardisk	1 Unit	Baik	
6	ALAT -ALAT ANGKUTAN			
	Roda 4	9 Unit	Baik	
	Roda 2	15 Unit	Baik	
7	GEDUNG SUARA SIDOARJO			Mutasi dari Dinas Perhubungan



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
				Kabupaten Sidoarjo
	Gedung RSPD	3.320 M2	Baik	
	Pondasi menara Grounding System Radio Active Tower RSPK Sidoarjo		Baik	
	Alat Pengukur Radiasi menara Telekomunikasi		Baik	
	Global Psitioning System(GPS)		Baik	
	Laser Distance Meter (LDM)		Baik	
	Alat Pengukur Elevasi Tanah		Baik	
	Software/data Masterplan		Baik	
	Zona Cell Planning		Baik	
8	DATA CENTER			
	Portable Generating Set	1 Unit	Baik	
	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik	
	Mesin Gergaji Besi	2 Unit	Baik	
	Peralatan Las Listrik	1 Unit	Baik	
	Tool Kit Set	1 Unit	Baik	
	Tool Kit Box	1 Unit	Baik	
	Tool Electrical Set	1 Unit	Baik	
	Bor	1 Unit	Baik	
	Rak Besi	1 Unit	Baik	
	Rak Besi	2 Unit	Baik	TIK
	Locker	2 Unit	Baik	TIK
	CCTV	6 Unit	Baik	
	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Baik	Sekretariat
	Lainnya L 9000	1 Unit	Baik	
	Lainnya Hikvision iDS-963NXI-18/X(8)	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Kayu	2 Unit	Baik	
	Meja Telepon	2 Unit	Baik	
	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik	
	Kursi Tamu	10 Unit	Baik	
	Workstation	1 Unit	Baik	
	A.C. Sentral	2 Unit	Baik	
	A.C. Window	1 Unit	Baik	
	A.C. Split	13 Unit	Baik	



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	A.C. Split	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Accesoris AC Standing Floor)	1 Unit	Baik	
	Lainnya (Accesoris AC Split 2 PK)	1 Unit	Baik	
	Televisi	2 Unit	Baik	
	Televisi	3 Unit	Baik	Bid. TIK
	Unit Power Supply	2 Unit	Baik	
	Unit Power Supply	3 Unit	Baik	Bid. TIK
	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik	
	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik	TIK
	Dispenser	1 Unit	Baik	
	Tangga Hidrolik	1 Unit	Baik	
	Tangga Hidrolik	1 Unit	Baik	TIK
	Coffee Maker	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Bracket Standing Peralatan	3 Unit	Baik	
	Hidran Kebakaran	1 Unit	Baik	Bid. TIK
	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	Baik	Sekretariat
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	Baik	Sekretariat
	Telecine	1 Unit	Baik	
	Tripod Camera	1 Unit	Baik	
	Camera Conference	6 Unit	Baik	
	Lainnya (Seagate)	8 Unit	Baik	TIK
	Telephone Mobile	16 Unit	Baik	
	Unit Tranceiver VHF Transportable	8 Unit	Baik	TIK
	Server Encryption	1 Unit	Baik	
	Mainframe (Komputer Jaringan)	11 Unit	Baik	
	Mainframe (Komputer Jaringan)	2 Unit	Baik	TIK
	Internet	1 Unit	Baik	
	P.C. Unit	5 Unit	Baik	
	P.C. Unit	1 Unit	Baik	Sekretariat
	P.C. Unit	3 Unit	Baik	TIK
	Lap Top	4 Unit	Baik	



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Note Book	2 Unit	Baik	TIK
	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	85 Unit	Baik	
	Lainnya (FLazher)	1 Unit	Baik	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik	
	External/ Portable Hardisk	6 Unit	Baik	
	Server	15 Unit	Baik	
	Router	2 Unit	Baik	
	Router	8 Unit	Baik	TIK
	Netware Interface External	1 Unit	Baik	TIK
	Repeater and Transciever	35 Unit	Baik	
	Terminal	20 Unit	Baik	
	Rak Server	2 Unit	Baik	
	Firewall	4 Unit	Baik	TIK
	CAT 6 Cable	7 Unit	Baik	TIK
	CAT 6 Cable	2 Unit	Baik	
	Kabel UTP	5 Unit	Baik	TIK
	Switch	18 Unit	Baik	TIK

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana. Berikut capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Periode 2019-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target PD Pada Tahun-			Realisasi Capaian Pada Tahun-			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase OPD dan Kecamatan Terintegrasi	-	-	-	70%	81%	100%	89,6%	110%	100%	128%	136%	100%
	Persentase Jaringan Desa/Kelurahan Terintegrasi	-	-	-	44%	64%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Aplikasi OPD berbasis E-Gov yang Terintegrasi dengan data center	-	-	-	60%	80%	100%	60%	80%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target PD Pada Tahun-			Realisasi Capaian Pada Tahun-			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	-	79	81	83	84,17	88,34	90,12	106,54%	109%	109%

Sumber: Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Periode 2019-2021 pada sasaran pertama yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi terdapat indikator kinerja sasaran yang melampaui target sehingga rasio capaian di atas 100%. Indikator persentase OPD dan kecamatan terintegrasi dan persentase aplikasi OPD berbasis E-gov yang terintegrasi dengan data center memenuhi target dan realisasi capaian tersebut meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sementara indikator kinerja sasaran persentase jaringan desa/kelurahan terintegrasi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki rasio capaian 0%. Pada sasaran strategis yang kedua dengan indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik juga melampaui target dari tahun 2019 hingga tahun 2021.



b. Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Periode 2017-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran Tahun 2019-2021					Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021					Capaian Anggaran %			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan OPD dan Kecamatan Terintegrasi	N/A	15.658.980,00	21.451.189.688,40	19.431.886.742,00	11.929.109.902,00	N/A	14.937.433,00	20.748.805.446,00	18.424.956.614,00	11.587.468.676,00	96,73%	94,82%	97,00%	25%	25%
	Persentase Jaringan Desa/Kelurahan Terintegrasi															
	Persentase Aplikasi OPD Berbasis E-Gov yang Terintegrasi dengan Data Center															



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran Tahun 2019-2021					Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021					Capaian Anggaran %			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Komunikasi Informasi Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	N/A	2.175.292.000,00	3.284.008.508,00	6.610.292.790,00	6.923.078.304,00	N/A	2.028.213.800,00	3.112,503.135,00	5.835.688.060,00	5.387.071.531,00	94,78%	88,28%	78,00%	25%	25%

Sumber: Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo periode sebelumnya dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi informasi publik. Sasaran strategis yang pertama mengalami penurunan rasio capaian dari tahun 2019-2020, kemudian mengalami kenaikan rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 97,00%. Sasaran strategis kedua mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021, dengan nilai capaian rasio tahun 2021 sebesar 78,00%.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

Strategi merupakan uraian mengenai langkah-langkah ataupun upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan maupun program-program sebagai penentu dan arah dalam rangka peningkatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo secara efektif dan efisien dalam waktu tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan sebagai penentu dasar dalam isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Terdapat dua dokumen yang menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yaitu telaah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo perlu untuk terus berinovasi guna meningkatkan kinerja, perpustakaan dan kearsipan daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Kebijakan terkait SPBE yang dapat berubah
- b. Rendahnya komitmen dari masing-masing PD untuk mengintegrasikan keamanan informasi public

Sedangkan peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan pelayanannya antara lain:

- a. Menyusun rumusan kebijakan agar meningkatkan capaian SPBE
- b. Regulasi dalam keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo



2.4.1 Telaah Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dalam menelaah capaian sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo diperlukan data terkait untuk data capaian kinerja perangkat kerja pada periode sebelumnya. Capaian kinerja tersebut nantinya akan ditelaah apakah sudah sinergis, telah berkontribusi dan bagaimana capaian tersebut dibandingkan dengan target pada renstra kementerian komunikasi dan informatika dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi perangkat daerah baru di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, maka belum terdapat data tentang capaian kinerja sebelumnya.

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L*

No	Sasaran Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo	Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sidoarjo 2017-2021	Sasaran pada renstra Diskominfo Provinsi Jatim Tahun 2019-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2019-2024
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase jaringan OPD dan Kecamatan Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
		Persentase Jaringan Desa/Kelurahan Terintegrasi	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
		Persentase Aplikasi OPD berbasis E-GOV yang terintegrasi dengan data center	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik



No	Sasaran Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo	Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sidoarjo 2017-2021	Sasaran pada renstra Diskominfo Provinsi Jatim Tahun 2019-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2019-2024
	Terhadap Keterbukaan Komunikasi Informasi Publik	layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	yang terpercaya dan berkualitas Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Berdasarkan komparasi pada tabel 2.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kesinergisan antara program dan indikator dalam Renstra Provinsi Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L.

Tabel 2.9

Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Tata Ruang	Rencana Tata Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1.	Sistem Jaringan Prasarana (salah satunya sistem jaringan informasi dan komunikasi)	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Perlunya pemenuhan jaringan informasi dan komunikasi yang merata, tidak hanya di perkotaan tetapi juga sampai desa.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Total terdapat 3 kolom pada tabel 3.1. Kolom pertama berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap Renstra K/L atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kajian terhadap Renstra OPD Provinsi yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Pada data capaian kinerja ini bersumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolom keempat dan kelima berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD. Sumber yang terdapat pada kolom keempat, kelima, dan keenam merupakan hasil dari diskusi dengan pemangku kepentingan atau pejabat struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu dilakukan analisis akar masalah, masalah dan masalah pokok Diskominfo. Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Tabel 3.1
Masalah pokok, Masalah dan Akar Masalah Diskominfo

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Perlunya mengoptimalkan komponen-komponen indeks SPBE untuk menunjang perencanaan dan pengambilan keputusan serta pelayanan baik kepada perangkat daerah maupun masyarakat	1. Tuntutan masyarakat akan kecepatan, transparansi dan keamanan	1. Pandemi COVID-19 yang berakibat pada berkurangnya anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika (menghambat pembangunan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		informasi dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">1. jaringan FO, pengadaan hardware, dll)2. Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal3. Masih adanya kesenjangan pemanfaatan TIK antara desa dengan kota menyebabkan belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat4. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kabupaten Sidoarjo5. Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi informasi mengenai kebijakan maupun hasil pembangunan daerah6. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat
		2. Pemanfaatan dokumen statistik sektoral yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">1. Kurangnya kualitas dan kuantitas bidang statistik2. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait sinergitas data sektoral3. Sarana prasarana pendukung yang kurang memadai



Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Diskominfo
		Internal (Kewenangan Diskominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Diskominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kajian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika : "Memperkuat transparansi publik dan pengelolaan komunikasi publik"	a. Jaringan FO sepanjang 40,00 km b. Indeks SPBE 3,13 (BAIK)	a. Menyusun Rumusan Kebijakan dan perbaikan untuk dapat meningkatkan indeks SPBE b. Menyusun kebijakan dalam keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten sidoarjo	a. Stabilitas PAD yang dilakukan oleh OPD untuk tercapainya sasaran b. Kebijakan terkait SPBE yang dapat berubah	a. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo b. Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal c. Pandemi COVID-19 yang berakibat pada berkurangnya anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika (menghambat pembangunan jaringan FO, pengadaan hardware, dll) d. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat
Kajian Renstra Diskominfo Jatim : "Mewujudkan Transparansi Akses Data Sektor dan Keamanan Informasi"	a. Indeks KAMI tahun 2020 yaitu C, Cukup dengan tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001	a. Menyusun kebijakan dalam keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten sidoarjo	a. Rendahnya komitmen dari masing-masing OPD untuk mengintegrasikan keamanan informasi publik	a. Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Diskominfo
		Internal (Kewenangan Diskominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Diskominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik”		b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan, analisis data statistik sektoral	b. Meningkatkan infrastruktur aplikasi yang dikembangkan untuk kapasitas statistik sektoral daerah Kabupaten Sidoarjo	b. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo c. Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal d. Masih adanya kesenjangan pemanfaatan TIK antara desa dengan kota menyebabkan belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat



3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**. Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual,



kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 5 misi yang dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Adapun 5 (Lima) misi tersebut antara lain:

Misi 1:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih



dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2:

Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sektor perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3:

Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbangertosusila dan titik



penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi ke 4:

Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi ke 5:

Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten



Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 1 (Satu) diatas yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan dan Tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha"**. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan 5 (lima) program antara lain:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain Pertama, Pandemi COVID-19 yang berakibat pada berkurangnya anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika (menghambat pembangunan jaringan FO, pengadaan hardware, dll); Kedua, Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo; Ketiga, Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo; Kelima, Belum optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni pada masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari sasaran yang telah ditetapkan serta terhambatnya pembangunan jaringan FO, pengadaan hardware dll yang bertujuan untuk pelayanan publik. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika perlu



untuk mempertahankan realisasi ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar merealisasikan anggaran sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan.

Faktor atau penghambat dari permasalahan kedua yakni kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada kabupaten sidoarjo untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi.

Faktor atau penghambat ketiga yakni pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal. Faktor pendukung atau yang dapat mengatasi masalah adanya ketaatan regulasi dalam keamanan informasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan.

Faktor atau penghambat keempat yakni minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan analisis data statistik sektoral. Faktor pendukung atau faktor yang dapat mengatasi masalah adalah dengan meningkatkan infrastruktur aplikasi yang mengembangkan kapasitas statistik sektoral.



Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”				
No.	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
	Program Prioritas: a. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat b. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif	1. Adanya tuntutan masyarakat akan kecepatan, transparansi dan keamanan informasi dalam pelayanan publik namun belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat	1. Pandemi COVID-19 yang berakibat pada berkurangnya anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika (menghambat pembangunan jaringan FO, pengadaan hardware, dll) 2. Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal 3. Masih adanya kesenjangan pemanfaatan TIK antara desa dengan kota menyebabkan belum optimalnya	1. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi ICT. 2. Penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada kabupaten sidoarjo untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi. 3. Ketaatan regulasi dalam keamanan informasi pemerintah kabupaten sidoarjo dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan.



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”				
No.	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>penyebarluasan informasi kepada masyarakat</p> <p>4. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kabupaten Sidoarjo</p> <p>5. Belum adanya juknis pelaksanaan layanan respon cepat</p> <p>6. Tidak adanya anggaran untuk mengimplementasikan layanan respon cepat</p>	<p>4. Tersedianya layanan Lapor, P3M, Call Center yang dibangun sebagai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.</p>



3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sarannya.

3.3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sinergis dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah **"Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik"**. Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran tersebut antara lain faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni pada kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi, pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah kabupaten sidoarjo yang belum optimal, minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan analisis data statistik sektoral.

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut:



Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permasalahan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Belum Optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Kabupaten Sidoarjo 4. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi 2. Pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah kabupaten sidoarjo yang belum optimal 3. Minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah kabupaten sidoarjo mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan analisis data statistik sektoral 4. Belum adanya juknis pelaksanaan layanan respon cepat 5. Tidak adanya anggaran untuk mengimplementasikan layanan respon cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada kabupaten sidoarjo untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi. 2. Ketaatan regulasi dalam keamanan informasi pemerintah kabupaten sidoarjo dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan. 3. meningkatkan infrastruktur aplikasi yang mengembangkan kapasitas statistik sektoral 4. Tersedianya layanan Laport, P3M, Call Center yang dibangun sebagai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.



3.3.2 TELAAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur". Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran tersebut antara lain Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi". Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran tersebut antara lain Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah "Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas". Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran tersebut antara lain masih menurunnya ketersediaan dokumen statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yaitu:



Tabel 3.5

Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim	Permasalahan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 2 Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi 2 Belum adanya juknis pelaksanaan layanan respon cepat 3 Tidak adanya anggaran untuk mengimplementasikan layanan respon cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada kabupaten sidoarjo untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi. 2 Tersedianya layanan Lapo, P3M, Call Center yang dibangun sebagai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 3 Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 	<ol style="list-style-type: none"> 4 Pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 3 Ketaatan regulasi dalam keamanan informasi pemerintah kabupaten sidoarjo dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan.
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 4 Masih menurunnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo 	<ol style="list-style-type: none"> 5 Minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 4 Meningkatkan infrastruktur aplikasi yang mengembangkan kapasitas statistik sektoral.



Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim	Permasalahan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengelolaan analisis data statistik sektoral	

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain :

Faktor Penghambat :

- a. Masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari sasaran yang telah ditetapkan serta terhambatnya pembangunan jaringan FO, pengadaan hardware dll yang bertujuan untuk pelayanan publik
- b. Belum optimalnya akses publik terhadap data informasi komunikasi.
- c. Pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah kabupaten sidoarjo yang belum optimal
- d. Belum optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah kabupaten sidoarjo
- e. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat

Faktor pendorong:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada kabupaten sidoarjo untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi.
- b. Adanya komitmen untuk keamanan informasi pemerintah kabupaten sidoarjo dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan.
- c. Meningkatkan infrastruktur aplikasi yang mengembangkan kapasitas statistik sektoral.



- d. Tersedianya layanan Laport, P3M, Call Center yang dibangun sebagai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

- a. Terhambatnya pembangunan jaringan
- b. Kesulitan publik dalam akses informasi dan komunikasi
- c. Persandian pemerintah daerah kabupaten sidoarjo yang belum maksimal
- d. Belum optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo
- e. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Prioritas janji politik yang perlu ditangani	30
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1 (20)	2 (10)	3 (20)	4 (10)	5 (30)	6 (10)	
1	Terhambatnya pembangunan jaringan	5	5	5	6	5	4	500
2	Kesulitan publik dalam akses informasi dan komunikasi	5	5	5	5	5	3	480
3	Persandian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang belum maksimal	5	5	4	5	4	4	440
4	Belum optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	5	5	4	5	4	4	440
5	Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat	5	5	5	5	5	3	480



Tabel 3.8
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Terhambatnya pembangunan jaringan	500	83,3
2	Kesulitan publik dalam akses informasi dan komunikasi	480	80
3	Persandian pemerintah daerah kabupaten sidoarjo yang belum maksimal	440	73,3
4	Belum optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah kabupaten sidoarjo	440	73,3
5	Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat	480	80

Dari kuesioner yang diambil dari para pengambil kebijakan (eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, maka urutan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Terhambatnya pembangunan jaringan
- b. Kesulitan publik dalam akses informasi dan komunikasi
- c. Belum optimalnya implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat
- d. Persandian pemerintah daerah kabupaten sidoarjo yang belum maksimal
- e. Minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah daerah kabupaten sidoarjo

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memprioritaskan program aplikasi informatika.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah

"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan visi maka perlu adanya penjabaran Visi tersebut dalam 5 (lima) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat sidoarjo yang mandiri. Adapun 5 (lima) misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan
4. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya
5. Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika terletak pada misi 1



(pertama) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan, sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD. Berikut dirumuskan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Berbasis Digital”

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran yaitu pada sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

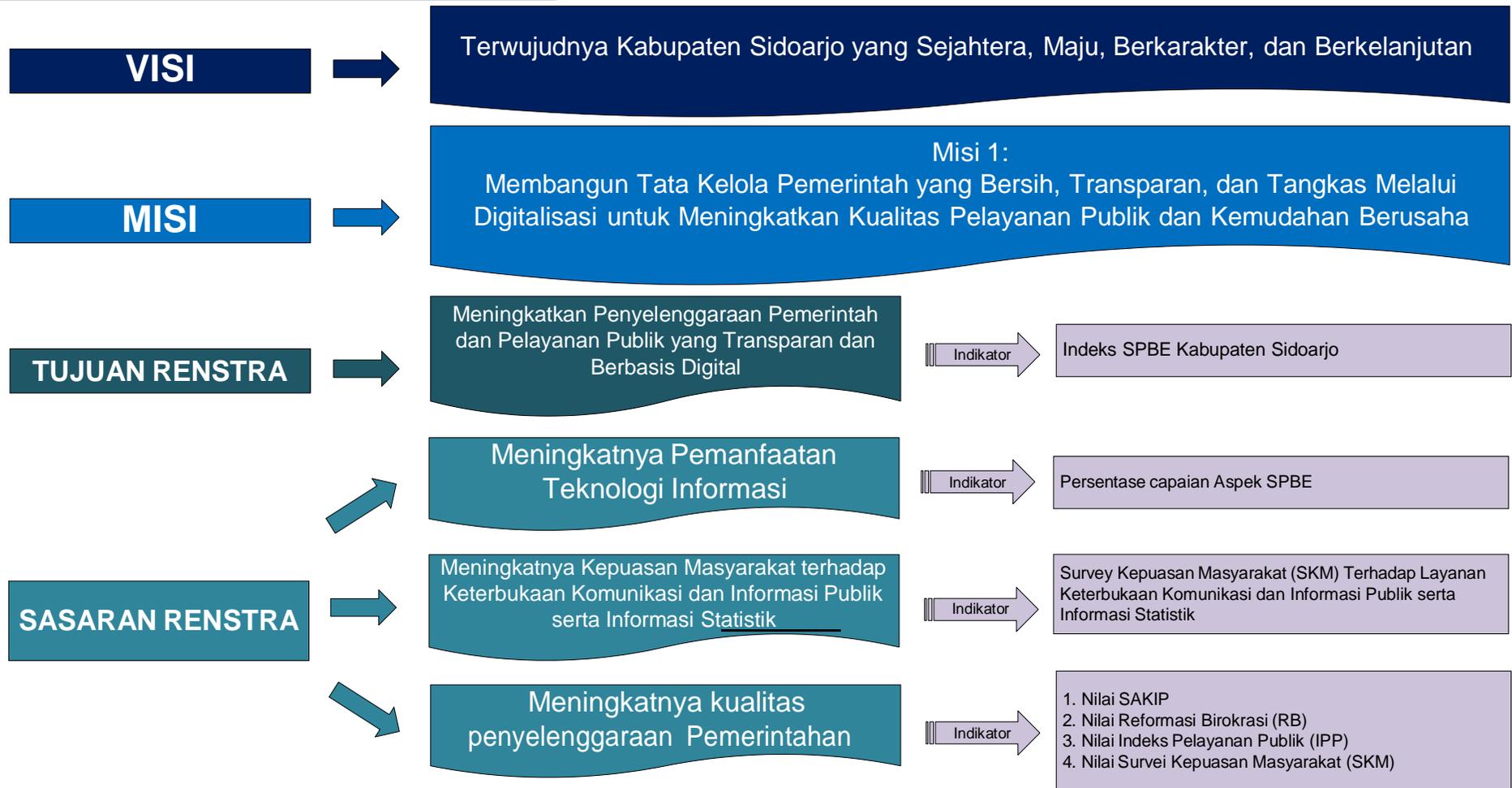
1. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi Informasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD: Terselenggarakannya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital									
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikator Utama									
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital		Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	3,25 (Baik)	3,35 (Baik)	3,45 (Baik)	4,00 (Baik)	4,1 (Baik)	4,25 (Baik)
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Capaian Aspek SPBE	20%	35%	108%	108%	108%	108%
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik Serta Informasi Statistik	83	85	87	89	91	93
Indikator Penunjang									
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	79,23	79,5	80,00	80,5	81,00
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	35,42	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	B	90,12	90,12	91,00	91,20	91,25
			Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik	2,24	2,5	3,01	3,5	4,01



Gambar 4.1
Cascading Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan sektor informatika dan mengantisipasi pada isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi Pertama perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha. Dengan tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha. Serta sasaran RPJMD Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif dari strategi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal maka dapat dianalisis lebih lanjut mengenai penentuan, pengambilan, serta penerapan strategis maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam perwujudan dalam ketersediaan pelayanan berbasis teknologi informasi publik yang transparan. Berikut merupakan identifikasi dan faktor internal serta faktor eksternal.



Tabel 5.1.
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal	
1. Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 2) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan pada masing-masing bidang 3) Ketersediaan aplikasi pendukung sebagai penunjang teknis operasional pelayanan publik 4) Tersedianya media publikasi yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menciptakan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien
2. Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2) Kurangnya sarana dan prasarana pada pembangunan Jaringan FO, pengadaan hardware, dll 3) Kurangnya sarana prasarana baik pada informasi dan komunikasi publik 4) Masih lemahnya koordinasi keterbukaan data dan informasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan lainnya 5) Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT dan pemahaman terhadap TIK di masing-masing PD

Faktor Lingkungan Eksternal	
1) Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kerjasama/MOU dengan pihak ketiga yaitu perusahaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2) Sarana fasilitator penyebarluasan informasi dan komunikasi kepada publik 3) Kerjasama dengan lembaga penelitian sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan 4) Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik 5) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 6) Pengguna layanan/masyarakat sudah familiar dengan perangkat mobile yang berbasis online 7) Tingginya kebutuhan data oleh khalayak publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat
2. Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih yang tidak diimbangi dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik 2) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan rawan serangan sistem hacker yang mengganggu stabilitas ketersediaan sistem informasi



3)	Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan teknologi informasi komunikasi
4)	Keakuratan publikasi data yang diragukan oleh publik menyebabkan pengguna layanan apatis terhadap keterbukaan data yang diberikan oleh pemerintah daerah
5)	Timbulnya keraguan publik karena semakin maraknya informasi-informasi dari berita hoax atau tidak bertanggung jawab
6)	Kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang lebih banyak di wilayah pedesaan daripada perkotaan menyebabkan sulitnya akses penyebaran teknologi informasi komunikasi
7)	Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dan arus informasi yang harus diterima masyarakat namun belum difilter terlebih dahulu

Strategi-Strategi	
1.	Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik
2.	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
3.	Menyediakan layanan akses internet dan intranet untuk organisasi perangkat daerah lainnya dan ruang publik
4.	Menyediakan fasilitas hosting dan colocation server di desa center
5.	Mengintegrasikan data-data layanan organisasi perangkat daerah di data warehouse untuk sistem informasi
5.	Melakukan peningkatan infrastruktur aplikasi yang dikembangkan untuk kapasitas sektoral daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Mengintegrasikan pelatihan dan penambahan wawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kompetensi dari lingkup internal maupun eksternal dalam mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi
7.	Melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mendukung perwujudan program smart city
8.	Penguatan komitmen di lingkungan internal dalam rangka peningkatan etos kerja maupun kinerja yang seoptimal mungkin
9.	Peningkatan dalam penyediaan untuk penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
10.	Pembentukan forum data sehingga memudahkan dalam koordinasi keterbukaan informasi data bagi publik

Identifikasi strategi-strategi pengembangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo di atas bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelayanan publik yang terintegrasi dengan internet dan SPBE. Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya ketersediaan pelayanan publik yang transparansi, akuntabilitas, serta



responsivitas khususnya pada keterbukaan informasi publik. Informasi publik berpengaruh terhadap penilaian kinerja publik pada implementasi kebijakan-kebijakan daerah yang tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan antara lain:

- 1. Penguatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)**
- 2. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan maupun hasil pembangunan daerah.**
- 3. Meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen statistik sektoral dalam perencanaan dan pembangunan**

Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan cakupan PD dalam mengembangkan SPBE dengan menggunakan pengelolaan Government Information Officer (ICT) ;
3. Mengembangkan publikasi melalui sistem yang dibangun berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan pengamanan informasi dengan penyelenggaraan sistem persandian
5. Menyediakan data sektoral Kabupaten Sidoarjo yang cepat, tepat dan valid.



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	1. Penguatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)	1. Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Meningkatkan cakupan PD dalam mengembangkan SPBE dengan menggunakan pengelolaan Government Information Officer (ICT);
	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	1. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan maupun hasil pembangunan daerah 2. Meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen statistik sektoral dalam perencanaan dan pembangunan	1. Mengembangkan publikasi melalui sistem yang dibangun berbasis teknologi informasi; 2. Meningkatkan pengamanan informasi dengan penyelenggaraan sistem persandian 3. Menyediakan data sektoral Kabupaten Sidoarjo yang cepat, tepat dan valid
	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	1. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah berbasis teknologi informasi	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kesekretariatan (administrasi keuangan, umum dan kepegawaian) 3. Mengkoordinasikan program/kegiatan area reformasi birokrasi, SPIP zona integritas dan akuntabilitas pada dinas 4. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kerja dan laporan kinerja



VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			5. Melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi data kegiatan umum 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah (PD)

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD)	Program dan Kegiatan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase PD yang memiliki keterisian SPBE	Program Aplikasi Informatika: 1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Program Informasi dan Komunikasi Publik: 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral: 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi: 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD)	Program dan Kegiatan
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai SAKIP2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)3. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota: <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5. Administrasi Umum Perangkat Daerah6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Di dalam RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai program prioritas yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab, berikut keterkaitan program prioritas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat, dengan program:
 - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Program Aplikasi Informatika
2. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif, dengan program:
 - a. Program Aplikasi Informatika

Pada program prioritas tersebut telah tercermin dan sesuai dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021-2026 meliputi:

- 1. Program Aplikasi Informatika**, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:



- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 7) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 8) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 9) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 10) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 11) Pengelolaan Government Chief Information Officer
 - 12) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- b. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**, terdiri dari kegiatan:
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik



- 3) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- 4) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 5) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 6) Pelayanan Informasi Publik
- 7) Layanan Hubungan Media
- 8) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 9) Manajemen Komunikasi Krisis
- 10) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 11) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 12) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 5) Pengembangan Infrastruktur
 - 6) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota,

terdiri dari kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator OPD Tahun 2021-2022

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Tahun 2021		Tahun 2022		
							Target	Rp	Target	Rp	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan kemudahan berusaha	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan dan berbasis digital	Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase capaian Aspek SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	11.669.109.902	100%	19.282.403.420
										Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%
					Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan pada kapabilitas proses	Rintisan	1.470.786.998	Terkelola	1.682.475.849	
						Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan	Transaksi		Kolaborasi		
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi yang terpasang di server Diskominfo	4	789.741.404	4	825.000
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi radio komunikasi pemerintah daerah yang berijin	1	66.000.000	2	1.029.717.430
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang selesai dibangun oleh Diskominfo	2	463.845.594	2	594.157.319	
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah paket informasi pada aplikasi executive summary dashboard	4	600.000	4	0	
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan masterplan Smart City	5	600.000	5	-	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelola TIK yang mendapatkan tersertifikasi kompetensi	20	0	54	57.776.100	
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN yang memahami tentang pengelolaan GCIO	49	150.000.000	49	0	



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya kegiatan evaluasi mandiri SPBE sesuai Permenpan RB No 59/2020	1		1	
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah yang ditetapkan	150	10.198.322.904	160	17.599.927.571
				Jumlah up time dalam 1 tahun		98%	98%			
					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain/Sub Domain OPD yang terlayani/terfasilitasi	150	15.892.500	10	67.000.000
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain/Sub Domain yang di MONEV	-	65.130.361	5	4.236.420
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Presentase Keberlangsungan Layanan Koneksi Intra perangkat daerah yang terkoneksi dengan NOC dan Data center	99%	10.117.300.043	99%	17.528.691.151
				Jumlah koneksi intranet yang terkoneksi dengan data center		2 48 OPD 3 Puskesmas Sekolah (1 SD, 2 SMP) 0 Pasar 0 Terminal 2 Ruang Publik	5			
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	84	6.380.855.950	85	5.809.342.112
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%		100%	
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	2	6.380.855.950	2	5.809.342.112



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Tahun 2021		Tahun 2022		
							Target	Rp	Target	Rp	
						Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindak lanjuti	3		3		
						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5	131.270.936	5	56.798.841	
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	286.933.750	7 (Selayang Pandang: Leaflet LAPOR : Vlog)	356.495.620	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	932.675.200	7 (Podcast Kominfo)	554.306.800	
						Pelayanan Informasi Publik	5	93.828.400	6 (Call Center)	947.968.400	
						Layanan Hubungan Media	6	4.024.868.814	7 (Aplikasi Media)	3.082.850.000	
						Manajemen Komunikasi Krisis	1	44.537.600	2 (Konsultan PPID)	57.387.600	
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1	771.781.250	3 (Penambahan SDM Non ASN untuk Tim Kreatif ; Penambahan SDM Tenaga Kreatif Editor)	860.077.000	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1	94.960.000	3	447.734.651	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	20%	542.222.354	20%	663.302.159
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	100%			
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa	3	542.222.354	3	663.302.159



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	4	96.186.707	4	106.451.622
					Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang tersertifikasi statistik	35	16.913.951	35	25.900.000
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata Statistik Sektoral yang dibangun	3	271.766.895	3	179.460.537
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah elemen Data Statistik yang diolah dan dianalisa dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80	157.354.801	80	351.490.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	494 (Cukup Baik)	260.000.000	Cukup Baik	1.342.360.000
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	6	260.000.000	7	1.342.360.000
				Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		7	7			
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang ditetapkan	30	50.000.000	31	25.050.000
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	50.000.000	1	215.000.000
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yg terintegrasi dgn design bsre	5	50.000.000	5	102.310.000
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	110.000.000	6	1.000.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13.949.532.879	100%	13.375.403.642
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	152.219.600	1 Dokumen	27.000.000
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	jumlah dokumen movev PD yang disusun		4 Dokumen	4 Dokumen			
			Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu		4 Dokumen	4 Dokumen			
				Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu		1 Dokumen	1 Dokumen			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	53.562.500	10 Dokumen	-
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Kali	3.471.750	1 Kali	4.250.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Kali	3.471.750	1 Kali	4.250.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kali	91.821.600	1 Kali	18.500.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan asn terbayar	62 Orang	7.991.387.687	62 Orang	8.273.340.510
						jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan		1 Laporan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.987.516.787	14 Bulan	8.269.640.510
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kali	3.870.900	1 Kali	3.700.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik	15 Unit	7.400.000	15 Unit	-
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik SKPD yang dimanfaatkan	2 Unit	7.400.000	3 Unit	-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi dan perundang-undangan	10 Orang	3.162.588.644	10 Orang	324.857.300
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang dilaksanakan	1 Kali	0	1 Kali	10.000.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan yang dilaksanakan	1 Kali	3.162.588.644	1 Kali	314.857.300
					Administarsi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan bacaan, peraturan perundang undangan dan koran yang tersedia	5 Buku	677.669.471	5 Buku	1.056.786.232
					jumlah bahan/material yang tersedia	5 Buah	5 Buah			
					Jumlah BBM yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
					jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	50 Laporan	50 Laporan			
					jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	2500 Kotak	2500 Kotak			
					Jumlah Komponen listrik/penerangan yang tersedia	30 Buah	30 Buah			
					Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	20 Kunjungan	20 Kunjungan			
					Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Buah	2 Buah			
					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2 Buah	2 Buah			



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan	10 Buah	22.504.428	10 Buah	4.226.750
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 Buah	78.238.222	2 Buah	38.328.041
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	2 Buah	575.000	2 Buah	-
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	12 Bulan	271.000.000	12 Bulan	288.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	10 Buah	15.372.033	10 Buah	18.494.075
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan, peraturan perundang undangan dan koran yang tersedia	5 Buku	4.923.810	5 Buku	6.840.000
					Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan Material Tersedia	5 BUah	65.097.333	5 BUah	19.197.049
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	20 Kunjungan	85.500.000	20 Kunjungan	47.672.500
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	10 Koordinasi	134.458.645	10 Koordinasi	634.027.817
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas jabatan yang dipelihara	1000 m ²	241.038.750	1000 m ²	139.500.000
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tersedia		15 Unit	15 Unit			
				jumlah stnk kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 Unit	15 Unit			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah stnk kendaraan dinas yang lunas pajaknya	5 Unit	8.500.000	5 Unit	13.500.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Tetap yang dipelihara	10 Unit	84.000.000	10 Unit	51.000.000
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	10 Unit	85.538.750	10 Unit	75.000.000



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
							Tahun 2021		Tahun 2022	
							Target	Rp	Target	Rp
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas jabatan yang dipelihara	1000 m ²	65.000.000	1000 m ²	-
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang disediakan	1 Unit	547.831.527	1 Unit	0
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang diadakan	1 Unit	472.468.000	1 Unit	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	2 Unit	75.363.527	2 Unit	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengelola keuangan yang terbayar	35 Orang	1.169.397.200	35 Orang	1.553.919.600
						jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2000 Buah		2000 Buah	
						jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	2 Orang		2 Orang	
						jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	2 Orang		2 Orang	
						rekening listrik, air telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan		12 Bulan	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dilaksanakan	1000 Surat	3.000.000	1000 Surat	3.040.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 Bulan	513.000.000	12 Bulan	523.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pengelola keuangan yang terbayar	35 Orang	653.397.200	35 Orang	1.027.879.600



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator OPD Tahun 2023-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator or Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja			
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase capaian Aspek SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	14.000.000.000	100%	20.171.187.659	100%	20.575.335.612	100%	20.692.615.025	100%	20.171.187.659	Bidang Tata Kelola Informatika	
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%		80%		90%		100%		100%			
						Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator tingkat kematangan layanan yang mencapai nilai >4	50%		60%		70%		80%		80%		1.500.000.000
							Persentase indikator tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen yang mencapai nilai >4	50%	1.300.000.000	60%	1.400.000.000	70%	1.450.000.000	80%	1.500.000.000	80%		1.500.000.000
							Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	150.000.000	48 Dokumen	160.000.000	48 Dokumen	170.000.000	48 Dokumen	180.000.000	48 Dokumen		180.000.000
							Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen		280.000.000
							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2 Unit	6.660.000	2 Unit	787.162.500	2 Unit	788.162.500	2 Unit	789.162.500	2 Unit		789.162.500
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	756.254.550	0	3.080.331.935	0	3.090.000.000	0	3.095.330.000	0	3.095.330.000		



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator or Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja			
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Dokumen	57.000.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	59.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	2 Perangkat Daerah	57.000.000	2 Perangkat Daerah	58.000.000	2 Perangkat Daerah	59.000.000	2 Perangkat Daerah	60.000.000	2 Perangkat Daerah	60.000.000	
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	6 Unit	319.558.978	6 Unit	547.262.971	6 Unit	548.262.971	6 Unit	549.262.971	6 Unit	549.262.971	
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan public yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	4 Layanan	157.258.206	4 Layanan	158.258.206	4 Layanan	159.258.206	4 Layanan	160.258.206	4 Layanan	160.258.206	
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	5 Dokumen	135.009.420	5 Dokumen	136.000.000	5 Dokumen	137.000.000	5 Dokumen	138.000.000	5 Dokumen	138.000.000	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	50 Dokumen	479.149.281	50 Dokumen	480.000.000	50 Dokumen	482.000.000	50 Dokumen	483.000.000	50 Dokumen	483.000.000	
						Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	115.200.000	2 Dokumen	116.000.000	2 Dokumen	116.500.000	2 Dokumen	116.500.000	
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem spbe	1 Dokumen	342.250.000	1 Dokumen	342.500.000	1 Dokumen	343.000.000	1 Dokumen	343.250.000	1 Dokumen	343.250.000	
						Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama dan sub domain perangkat daerah yang ditetapkan	170		180		190		200		200		Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Jumlah up-time dalam 1 tahun		98%	12.000.000.000	98%	13.000.000.000	98%	14.000.000.000	98%	15.000.000.000	98%	15.000.000.000		
						Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	1 Domain; 101 Sub Domain	10.000.000	1 Domain; 101 Sub Domain	70.000.000	1 Domain; 101 Sub Domain	71.000.000	1 Domain; 101 Sub Domain	72.000.000	1 Domain; 101 Sub Domain	72.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator or Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	222.554.827	1 Dokumen	223.000.000	1 Dokumen	224.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	60 Unit	11.271.770.800	60 Unit	26.590.662.325	60 Unit	26.595.662.325	60 Unit	26.600.000.000	60 Unit	26.600.000.000	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	86		87		88		89		89	6.837.449.474	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	6.356.278.676	100%	6.627.056.148	100%	6.798.696.902	100%	6.837.449.474	100%		
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	2	4.000.000.000	2	4.500.000.000	2	5.000.000.000	2	5.500.000.000	2	5.500.000.000	
						Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	3		3		3		3		3		
					Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	52.000.000	3 Dokumen	54.000.000	3 Dokumen	56.000.000	3 Dokumen	56.000.000	
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	365 Dokumen	51.920.237	365 Dokumen	59.000.000	365 Dokumen	60.000.000	365 Dokumen	65.000.000	365 Dokumen	65.000.000	
					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	0 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan	1 Dokumen	205.770.000	1 Dokumen	253.000.000	1 Dokumen	254.000.000	1 Dokumen	255.000.000	1 Dokumen	255.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikat or Tujuan	Sasaran PD	Indikat or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja			
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
						Media Komunikasi Publik	perencanaan media komunikasi publik											
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokume n	418.896.800	1 Dokume n	926.000.000	1 Dokume n	927.000.000	1 Dokume n	928.000.000	1 Dokume n	928.000.000	
						Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 Dokume n	812.972.400	1 Dokume n	92.000.000	1 Dokume n	92.500.000	1 Dokume n	93.000.000	1 Dokume n	93.000.000	
						Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	2 Layanan	1.592.614.938	2 Layanan	1.515.000.000	2 Layanan	1.520.000.000	2 Layanan	1.525.000.000	2 Layanan	1.525.000.000	
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 Dokume n	307.111.250	1 Dokume n	155.000.000	1 Dokume n	160.000.000	1 Dokume n	165.000.000	1 Dokume n	165.000.000	
						Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah dokumen hasil manajemen komunikasi krisis	1 Dokume n	80.972.600	1 Dokume n	47.500.000	1 Dokume n	48.000.000	1 Dokume n	48.500.000	1 Dokume n	48.500.000	
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	7 Orang	122.625.000	7 Orang	915.500.000	7 Orang	916.000.000	7 Orang	916.500.000	7 Orang	916.500.000	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokume n	40.000.000	1 Dokume n	102.500.000	1 Dokume n	103.000.000	1 Dokume n	103.500.000	1 Dokume n	103.500.000	
						Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	3 Unit	30.600.000	3 Unit	-	3 Unit	400.000.000	3 Unit	-	3 Unit	-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	40%		60%		80%		100%		100%		Bidang Statistik
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	744.500.202	100%	759.390.206	100%	774.578.010	100%	790.069.571	100%	790.069.571		
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang diolah dan dianalisa	2	530.000.000	4	540.000.000	4	550.000.000	4	560.000.000	4	560.000.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan	2 Dokume n	58.415.000	2 Dokume n	93.000.000	2 Dokume n	94.000.000	2 Dokume n	95.000.000	2 Dokume n	95.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikat or Tujuan	Sasaran PD	Indikat or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja			
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
						Diseminasi Data Statistik Sektoral	diseminasi data statistik sektoral											
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	0	19.000.000	35 Orang	19.500.000	35 Orang	20.000.000	35 Orang	20.500.000	35 Orang	20.500.000	
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	0	271.000.000	3 Dokumen	271.500.000	3 Dokumen	271.600.000	3 Dokumen	272.000.000	3 Dokumen	272.000.000	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0	60.000.000	35 Orang	65.000.000	35 Orang	70.000.000	35 Orang	75.000.000	35 Orang	75.000.000	
						Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	0	60.000.000	0	65.000.000	0	70.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	2 Dokumen	121.600.000	2 Dokumen	154.000.000	2 Dokumen	155.000.000	2 Dokumen	156.000.000	2 Dokumen	156.000.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Cukup Baik	1.403.071.200	Cukup Baik	1.431.132.624	Cukup Baik	1.459.755.276	Cukup Baik	1.488.950.382	Cukup Baik	1.488.950.382	Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area kontrol keamanan informasi yang terpenuhi berdasar ISO 27001:2013	7	415.000.000	8	420.000.000	8	425.000.000	9	430.000.000	9	430.000.000	
							Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	7		8		8		8		8		
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	32 Dokumen	52.000.000	32 Dokumen	52.500.000	32 Dokumen	53.000.000	32 Dokumen	53.500.000	32 Dokumen	53.500.000	
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	53.000.000	1 Laporan	53.500.000	1 Laporan	53.500.000	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	53.000.000	1 Laporan	53.500.000	1 Laporan	53.500.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	50.000.000	49 Perangkat Daerah	253.000.000	49 Perangkat Daerah	254.000.000	49 Perangkat Daerah	255.000.000	49 Perangkat Daerah	255.000.000	
			Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	12.798.680.162	100%	12.926.666.963	100%	13.055.933.633	100%	13.986.492.969	100%	13.986.492.969	Sekretariat
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		Jumlah dokumen money PD yang disusun	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	
				Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	
						Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	33.954.375	8 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	2.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	4.750.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator or Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	4.750.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.750.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.600.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan asn terbayar	62 Orang	7.000.000.000	62 Orang	7.000.000.000						
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	8.363.841.431	70 Orang	8.500.000.000	80 Orang	9.000.000.000	90 Orang	9.500.000.000	90 Orang	9.500.000.000
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	5.800.000	2500 Dokumen	2.000.000	2500 Dokumen	2.000.000	2500 Dokumen	2.000.000	2500 Dokumen	2.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.800.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.800.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikat or Tujuan	Sasaran PD	Indikat or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik	15 Unit	50.000.000	15 Unit	50.000.000	15 Unit	50.000.000	15 Unit	50.000.000	15 Unit	50.000.000	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi dan perundang-undangan	10 Orang	7.500.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	12.500.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	40.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	5.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan bacaan, peraturan perundang undangan dan koran yang tersedia	5 Buku	3.000.000	5 Buku	4.000.000	5 Buku	4.500.000	5 Buku	5.000.000	5 Buku	5.000.000	
						jumlah bahan/material yang tersedia	5 Buah	20.000.000	5 Buah	30.000.000	5 Buah	35.000.000	5 Buah	40.000.000	5 Buah	40.000.000	
						Jumlah BBM yang disediakan	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikat or Tujuan	Sasaran PD	Indikat or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	16.000.000	50 Laporan	17.000.000	50 Laporan	18.000.000	50 Laporan	18.000.000	
						Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	2500 Kotak	30.000.000	2500 Kotak	40.000.000	2500 Kotak	50.000.000	2500 Kotak	60.000.000	2500 Kotak	60.000.000	
						Jumlah Komponen listrik/penerangan yang tersedia	30 Buah	30.000.000	30 Buah	40.000.000	30 Buah	50.000.000	30 Buah	55.000.000	30 Buah	55.000.000	
						Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	30 Kunjungan	30.000.000	35 Kunjungan	40.000.000	40 Kunjungan	45.000.000	45 Kunjungan	50.000.000	45 Kunjungan	50.000.000	
						Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Buah	300.000.000	2 Buah	400.000.000	2 Buah	500.000.000	2 Buah	550.000.000	2 Buah	550.000.000	
						Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2 Buah	7.500.000	2 Buah	8.000.000	2 Buah	8.250.000	2 Buah	8.500.000	2 Buah	8.500.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3.158.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	19.775.525	1 Paket	20.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.250.000	1 Paket	8.500.000	1 Paket	8.500.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	290.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	375.000.000	1 Paket	375.000.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	9.157.500	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	6.120.000	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	
						Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	10.469.770	1 Paket	16.000.000	1 Paket	17.000.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	18.000.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	42.750.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	329.992.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikat or Tujuan	Sasaran PD	Indikat or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja			
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang disediakan	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000							
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	120.331.500	4 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	250.000.000	4 Unit	250.000.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	35 Orang	50.000.000	35 Orang	52.500.000	35 Orang	55.000.000	35 Orang	60.000.000	35 Orang	60.000.000	
							Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2000 Buah	3.500.000	2000 Buah	4.000.000	2000 Buah	4.500.000	2000 Buah	5.000.000	2000 Buah	5.000.000	
							Jumlah tenaga keaman kantor yang terbayar	2 Orang	125.000.000	2 Orang	150.000.000	2 Orang	200.000.000	2 Orang	250.000.000	2 Orang	250.000.000	
							Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	2 Orang	125.000.000	2 Orang	150.000.000	2 Orang	200.000.000	2 Orang	250.000.000	2 Orang	250.000.000	
							Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	475.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	475.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	912.319.600	12 Laporan	52.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah luas Gedung/ kantor/ rumah dinas jabatan yang dipelihara	1000 m ²	170.000.000	1000 m ²	190.000.000	1000 m ²	195.000.000	1000 m ²	200.000.000	1000 m ²	200.000.000	
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tersedia	15 Unit	15.000.000	15 Unit	20.000.000	15 Unit	25.000.000	15 Unit	30.000.000	15 Unit	30.000.000	



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator or Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Perangkat Kerja		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit	15.000.000	15 Unit	20.000.000	15 Unit	25.000.000	15 Unit	30.000.000	15 Unit	30.000.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 Unit	15.000.000	23 Unit	8.000.000	23 Unit	9.000.000	23 Unit	10.000.000	23 Unit	10.000.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	10.000.000	8 Unit	12.000.000	8 Unit	14.000.000	8 Unit	16.000.000	8 Unit	16.000.000	
						Pemeliharaan Mebel	3 Unit	5.000.000	3 Unit	7.000.000	3 Unit	9.000.000	3 Unit	11.000.000	3 Unit	11.000.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216 Unit	40.000.000	216 Unit	20.000.000	216 Unit	25.000.000	216 Unit	30.000.000	216 Unit	30.000.000	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23 Unit	75.000.000	23 Unit	20.000.000	23 Unit	25.000.000	23 Unit	30.000.000	23 Unit	30.000.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	170.000.000	4 Unit	190.000.000	4 Unit	195.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	50.000.000	4 Unit	55.000.000	4 Unit	60.000.000	4 Unit	65.000.000	4 Unit	65.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi pertama yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha”**. Dengan tujuan RPJMD yakni meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital”

Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD yang tertuang dalam Tabel 7.1



Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Terselenggara nya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital											
No	Indikator	Definisi Operasional		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Formulasi Perhitungan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Indikator Utama											
Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital											
1	Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	Rata-rata Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo		3,13 (BAIK)	3,25 (Baik)	3,35 (Baik)	3,45 (Baik)	4,00 (Baik)	4,1 (Baik)	4,25 (Baik)	4,25 (Baik)
Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi											
1	Persentase Capaian Aspek SPBE	$\frac{\text{Nilai akhir x 8 aspek penilaian}}{\text{3 x 8 aspek penilaian}} \times 100\%$	%	-	20%	35%	108%	108%	108%	108%	108%
Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik											
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi public serta informasi statistik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informatika publik serta informasi statistik		83	83	85	87	89	91	93	93
Indikator Penunjang											



Sasaran RPJMD : Terselenggara nya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital											
No	Indikator	Definisi Operasional		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Formulasi Perhitungan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah											
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP		N/A	BB	79,23	79,5	80,00	80,5	81,00	81,00
4	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil penilaian RB		N/A	35,42	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00
5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat		N/A	B	90,12	90,12	91,00	91,20	91,25	91,25
6	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil evaluasi pelayanan publik		N/A	Baik	2,24	2,5	3,01	3,5	4,01	4,01



Dengan adanya Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam sasaran. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- 1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi**
- 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi public**
- 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah**

Adapula kegunaan dari indikator kinerja yang mengutamakan pada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Sasaran dan indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah tertuang pada Tabel 7.2

Tabel 7.2

Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama PD (IKU OPD)	Formulasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Capaian Aspek SPBE	$\frac{\text{Nilai akhir} \times 8 \text{ aspek penilaian}}{3 \times 8 \text{ aspek penilaian}} \times 100\%$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informatika publik serta informasi statistik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP
	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil penilaian RB
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat
	Nilai Pelayanan Publik (IPP)	Hasil evaluasi pelayanan publik



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Diskominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Diskominfo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Diskominfo.

Sidoarjo, 27 Juni 2023

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. Didik Triwahyudi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196508251992101003

Form E.73
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026

RPJMD Kabupaten Sidoarjo		RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kesesuaian /		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
			Ya	Tidak			
(1)		(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi:							
	"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"					-	-
Misi:							
	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					-	-
Tujuan:							
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-
Sasaran							
	1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital. 2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.	1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-
Strategi:							
	1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap. 2. Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan. 3. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)	1. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-

	<p>1. Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik)</p> <p>2. Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital.</p> <p>3. Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk kemudahan investasi.</p>	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan maupun hasil pembangunan daerah</p> <p>2. Meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen statistik sektoral dalam perencanaan dan pembangunan</p>	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-
		<p>1. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah berbasis teknologi informasi</p>					

Kebijakan:

	<p>1. Penguatan tata kelola pemerintah dan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>2. Meningkatkan cakupan PD dalam mengembangkan SPBE dengan menggunakan pengelolaan Government Information Officer (ICT)</p>	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-
		<p>1. Mengembangkan publikasi melalui sistem yang dibandung berbasis teknologi informasi</p> <p>2. Meningkatkan pengamanan informasi dengan penyelenggaraan sistem persandian</p> <p>3. Menyediakan data sektoral Kabupaten Sidoarjo yang cepat, tepat, dan valid</p>	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2027	-	-
		<p>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kesekretariatan (administrasi keuangan, umum dan kepegawaian)</p> <p>3. Mengkoordinasikan program/kegiatan area reformasi birokrasi, SPIP zona integritas dan akuntabilitas pada dinas</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kerja dan laporan kinerja</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi data kegiatan umum</p> <p>6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN</p>	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2028	-	-

Penetapan Indikator Kinerja Daerah:

	<p>Urusan Komunikasi dan Informatika: 1. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p>	<p>Indikator Tujuan: Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo Indikator Sasaran: 1. Persentase Capaian Aspek SPBE 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik 3. Nilai SAKIP 4. Nilai RB 5. Nilai SKM 6. Nilai IPP</p>	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan:	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indi	v	-	Sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	-	-	

Form E.80
Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Periode Pelaksanaan : 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :

1. Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo
2. Persentase Capaian Aspek SPBE
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik serta informasi statistik
4. Nilai SAKIP
5. Nilai RB
6. Nilai SKM
7. Nilai IPP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun										Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2021		2022		2023 (TW 1)		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet		100%	Rp 20.692.615.025	100%	Rp 11.669.109.902	100%	Rp 11.100.530.985	100%	Rp 14.000.000.000	100%	Rp 20.171.187.659	100%	Rp 20.575.335.612	100%	Rp 20.692.615.025			25%	Rp 1.700.860.458	25%	Rp 1.700.860.458			25%	15%	25%	12%	
			Persentase layanan public yang diselenggarakan		100%		50%		70%		70%		80%		90%		100%			16%		16%			23%		23%				
1.1	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat kematangan pada Rintisan			Rp 1.470.786.998			Terkelola	Rp 1.682.475.849																					
			Tingkat kematangan pada Transaksi						Kolaborasi																						
			Persentase indikator tingkat kematangan layanan yang		80%	Rp 1.500.000.000			50%	Rp 818.760.185		50%	Rp 1.300.000.000	60%	Rp 1.400.000.000	70%	Rp 1.450.000.000	80%	Rp 1.500.000.000			12%	Rp 48.325.996	12%	Rp 48.325.996			24%	6%	24%	4%
			Persentase indikator tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan		80%				50%			50%		60%		70%		80%			12%		12%			24%		24%			
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan		48 Dokumen	Rp 180.000.000					48 Dokumen	Rp 150.000.000	48 Dokumen	Rp 160.000.000	48 Dokumen	Rp 170.000.000	48 Dokumen	Rp 180.000.000													
1.1.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran		1 Dokumen	Rp 280.000.000					1 Dokumen	Rp 250.000.000	1 Dokumen	Rp 260.000.000	1 Dokumen	Rp 270.000.000	1 Dokumen	Rp 280.000.000													
1.1.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah aplikasi yang terpasang di server Diskominfo		4	Rp 789.741.404		4	Rp 825.000																						
			Jumlah pusat data Pemerintahan Daerah yang		2 Unit	Rp 789.162.500		2 Unit	Rp 6.000.000		2 Unit	Rp 6.660.000	2 Unit	Rp 787.162.500	2 Unit	Rp 788.162.500	2 Unit	Rp 789.162.500			1 Unit	Rp 6.660.000	1 Unit	Rp 6.660.000			50%	111%	50%	100%	
1.1.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah		Jumlah frekuensi radio komunikasi pemerintah daerah		1	Rp 66.000.000		1	Rp 1.029.717.430																						
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi		0	Rp 3.095.330.000		1 Dokumen	Rp 420.575.000		1 Dokumen	Rp 756.254.550	0	Rp 3.080.331.935	0	Rp 3.090.000.000	0	Rp 3.095.330.000			0	Rp -	0	Rp -			0%	0%	0%	0%	
1.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan		1 Dokumen	Rp 60.000.000					1 Dokumen	Rp 57.000.000	1 Dokumen	Rp 58.000.000	1 Dokumen	Rp 59.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000													
1.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data		2 Perangkat Daerah	Rp 60.000.000					2 Perangkat Daerah	Rp 57.000.000	2 Perangkat Daerah	Rp 58.000.000	2 Perangkat Daerah	Rp 59.000.000	2 Perangkat Daerah	Rp 60.000.000													
1.1.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah aplikasi yang selesai dibangun oleh Diskominfo		2	Rp 463.845.594		2	Rp 594.157.319																						
			Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		6 Unit	Rp 549.262.971		6 Unit	Rp 292.185.185		6 Unit	Rp 319.558.978	6 Unit	Rp 547.262.971	6 Unit	Rp 548.262.971	6 Unit	Rp 549.262.971			1 Unit	Rp 41.665.996	1 Unit	Rp 41.665.996			17%	14%	17%	13%	
1.1.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah paket informasi pada aplikasi executive		4	Rp 600.000		4	Rp -																						
			Jumlah layanan public yang terhubung dengan sistem		4 Layanan	Rp 160.258.206					4 Layanan	Rp 157.258.206	4 Layanan	Rp 158.258.206	4 Layanan	Rp 159.258.206	4 Layanan	Rp 160.258.206													
1.1.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan masterplan Smart		5	Rp 600.000		5	Rp -																						
			Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan		5 Dokumen	Rp 138.000.000					5 Dokumen	Rp 135.009.420	5 Dokumen	Rp 136.000.000	5 Dokumen	Rp 137.000.000	5 Dokumen	Rp 138.000.000													
1.1.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Pengelola TIK yang mendapatkan nomor dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi		20	Rp -		20	Rp 57.776.100																						
			Jumlah dokumen pengelolaan pemerintah chief		50 Dokumen	Rp 483.000.000					50 Dokumen	Rp 479.149.281	50 Dokumen	Rp 480.000.000	50 Dokumen	Rp 482.000.000	50 Dokumen	Rp 483.000.000													
1.1.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah ASN yang memahami tentang pengelolaan GCIO		49	Rp 150.000.000		49	Rp -																						
			Jumlah dokumen pengelolaan government chief		2 Dokumen	Rp 116.500.000		2 Dokumen	Rp 100.000.000		2 Dokumen	Rp 150.000.000	2 Dokumen	Rp 115.200.000	2 Dokumen	Rp 116.000.000	2 Dokumen	Rp 116.500.000			0	Rp -	0	Rp -			0%	0%	0%	0%	
1.1.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Terlaksananya kegiatan evaluasi mandiri SPBE sesuai Permempnan		1	Rp -		1	Rp -																						
			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 Dokumen	Rp 343.250.000					1 Dokumen	Rp 342.250.000	1 Dokumen	Rp 342.500.000	1 Dokumen	Rp 343.000.000	1 Dokumen	Rp 343.250.000													
1.2	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub		Jumlah Nama dan Sub Domain perangkat daerah		200	Rp 15.000.000.000	150	Rp 10.198.332.904	170	Rp 10.281.770.800	170	Rp 12.000.000.000	180	Rp 13.000.000.000	190	Rp 14.000.000.000	200	Rp 15.000.000.000			42	Rp 1.652.534.462	42	Rp 1.652.534.462			25%	16%	25%	14%	
			Jumlah waktu dalam 1 tahun		98%		98%		98%		98%		98%		98%		98%				98%		98%			100%		100%			

